

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini membahas tentang peran dan strategi LSM Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) dalam pendampingan terhadap perempuan korban KDRT di Kabupaten Tuban. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti antara lain :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Maya Puspita (Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan) yang dilakukan pada tahun 2006 dengan judul Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menangani Permasalahan Kesenjangan Gender Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh LSM Paramitra Malang. Fokus masalah penelitian yang dilakukan Maya Puspita adalah untuk mengetahui penanganan permasalahan kesetaraan gender pada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan perbedaan dari fokus yang dilakukan Maya Puspita dengan Peneliti yaitu dari subjek yang diteliti dan objek penelitian yang mana peneliti lebih terfokus pada peran LSM dalam pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Jadi perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Maya Puspita dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah pertama, jika Maya Puspita melakukan penelitian di Lembaga Paramitra Malang, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Lembaga Koalisi Perempuan Ronggolawe tepatnya di Kabupaten Tuban. Kedua, penelitian yang dilakukan peneliti lebih fokus ke peran lembaga dalam pendampingan terhadap perempuan

korban kasus kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan untuk penelitian yang dilakukan Maya Puspita mengenai penanganan permasalahan kesetaraan gender.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Lisa Hendhika Utami dalam Jurnal Pendidikan Luar Sekolah Volume VI Nomor 5. Tahun 2017 yang berjudul Peran Pekerja Sosial Dalam Pemberdayaan Korban KDRT Di Balai Perlindungan dan Rehabilitas Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta. Disini dapat dilihat bahwa fokus penelitian yang dilakukan Lisa Hendhika Utami adalah lebih fokus pada peran pekerja sosial dalam pemberdayaan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan jika penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang peran dan strategi lembaga dalam pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Indri Kusumastuti (Mahasiswa Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana) yang dilakukan pada tahun 2009 dengan judul Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan. Dalam penelitian ini membahas apa saja kendala dan hambatan bagi unit korban perkosaan, hingga bagaimana peranannya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah penelitian Indri Kusumastuti membahas tentang kekerasan seksual yaitu perkosaan, dan hanya memberikan peran perlindungan dari sudut hukum saja tanpa pendampingan dari unit pelayanan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan bagaimana peran LSM Koalisi Perempuan Ronggolawe tersebut dalam pendampingan korban KDRT yang dialami perempuan.

## **B. Konsep Peran**

Peran adalah suatu konsep perihal apa yang didapat dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan status apabila seseorang atau lembaga melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 1986 : 2) .

Peran LSM terhadap penanganan KDRT merupakan sebuah bentuk kegiatan yang bersifat advokasi atau pembelaan oleh pihak LSM, baik dalam bentuk pendampingan, sosialisasi, transformasi dan analisis kebijakan dalam menanggulangi permasalahan diskriminasi dan marginalisasi kaum perempuan, khususnya dalam hal ini adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Struktur sosial, persepsi masyarakat tentang perempuan dan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta nilai masyarakat yang selalu ingin tampak harmonis dan karenanya sulit mengakui akan adanya masalah dalam rumah tangga, merupakan tiga hal pokok penyebab yang mendasari ketidakpedulian tersebut. Untuk itu, dibutuhkan suatu pendidikan publik/penyuluhan untuk membuat masyarakat menyadari akan hak-hak dan kedudukan perempuan dalam masyarakat, dan yang secara khusus menjelaskan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk hak-hak mereka dan juga tentang tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. KUHP sebagai salah satu sumber hukum pidana yang mempunyai kaitan langsung dengan tindak kekerasan terhadap perempuan, dapat dijadikan instrumen dalam penanggulangan secara yuridis. Dari sini maka peran LSM menjadi relevan sebagai sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bekerja kepada pembelaan hak-hak kaum perempuan, khususnya dalam KDRT. Beberapa dampak dari KDRT baik secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, akan membawa trauma bagi kaum perempuan,

oleh karenanya salah satu bentuk advokasi yang dilakukan adalah dengan melakukan konsultasi psikologis dan konseling. Peran LSM merupakan salah satu manifestasi sifat organik dari para kaum intelektual dalam melakukan transformasi menuju perubahan sosial, dalam hal ini adalah bagaimana memunculkan bentuk partisipatif dari masyarakat dalam menyikapi kenyataan dan persoalan yang dihadapinya. (Fakih, 2004: 159)

Dari keterangan diatas maka peran LSM dalam KDRT adalah sebagai pihak yang membela bagi kaum kaum yang termaginalkan, khususnya dalam kasus KDRT, yakni sebagai media konseling, pendampingan, advokasi hukum dan pengorganisasian solidaritas.

### **C. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**

Pada umumnya Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. (Winarno, 2002:102)

Lembaga Swadaya Masyarakat bisa disebut juga dengan Organisasi Pelayanan Manusia (*Human Service Organization*) yaitu merupakan sebuah proses dan strategi dalam mengelola lembaga atau organisasi pelayanan sosial yang berorientasi pada nilai nilai kemanusiaan (*Human Values*) dan kepuasan penerima pelayanan (*client's satisfaction*). Identifikasi dan unsur unsur dari definisi tersebut, kemudian rumuskan menjadi definisi yang lebih koprehensif:

1. HSO adalah Organisasi Pelayanan
2. Pemberian kepuasan pelayanan kepada individu dan kelompok

3. Memiliki program kerja
4. Memiliki struktur dan aturan
5. Sekumpulan orang yang tergabung dalam satu lembaga
6. Pemberian pelayanan pertolongan kepada individu dan kelompok
7. Mengadvokasi setiap permasalahan individu
8. Memiliki regulasi kerja yang jelas

Jadi secara komprehensif adalah lembaga pelayanan kemanusiaan yang memberikan pertolongan secara individu dan kelompok, yang menjalankan tugas dan fungsinya. Yang memiliki struktur kerja dan program kerja pertolongan/layanan kepada setiap individu dan kelompok untuk mengadvokasi permasalahan individu dan kelompok.

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat :

*“Yang dimaksud dengan Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/ lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.”*

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No.28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka secara umum organisasi non pemerintah di Indonesia berbentuk yayasan.

#### **D. Konsep Pendampingan**

Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan (Direktorat Bantuan Sosial, 2007: 4).

Pendampingan sosial merupakan suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan klien yang bertujuan untuk memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya (Departemen Sosial RI, 2009: 122).

Dari definisi-definisi di atas, pendampingan dapat diartikan sebagai proses relasi sosial antara pendamping dan klien dalam bentuk memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya dalam usaha memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan.

#### **E. Konsep Perempuan Korban Kekerasan**

Setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi. Seringkali

kekerasan pada perempuan terjadi karena adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki laki. “Hak istimewa” yang dimiliki laki laki ini seolah olah menjadikan perempuan sebagai “barang” milik laki laki yang berhak untuk diperlakukan semena mena, termasuk dengan cara kekerasan. (kesreprodoinfo, redaksi : 2007)

Persoalan mendasar mengapa perempuan sering kali menjadi korban kekerasan yakni menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah adanya cara pandang yang tidak seimbang terhadap posisi laki laki dan perempuan. Adanya relasi kuasa yang tidak seimbang dalam masyarakat antara perempuan dan laki laki, mengakibatkan perempuan cenderung dirugikan dan menjadi korban. Terlebih lagi apabila salah satu pihak (pelaku kekerasan) memegang kendali atas diri korban. Kendali itu bisa beragam bentuknya, bisa ekonomi, pengetahuan, penerimaan masyarakat, maupun hubungan seperti orang tua dan anak, majikan buruh, guru dan muridnya dan lainnya. Faktor lain menjadi penyebab tidak tersentuhnya akar pokok kekerasan pada perempuan adalah kurangnya pemahaman dan penghargaan oleh pemangku dan penegak hukum terhadap pemenuhan hak hak perempuan sebagai korban. Seperti penjelasan Komnas Perempuan, bahwa penanganan kekerasan merupakan hasil dari relasi kekuasaan yang tidak setara. Hal ini terjadi karena penanganan dan pencegahan masih tetap parsial belum terbangun sistem hukum yang berperspektif HAM dan gender yang efektif serta menyeluruh.

## **F. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### **1. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di Indonesia. Jika selama ini kejadian tersebut nyaris tidak terdengar, hal itu lebih disebabkan adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan peristiwa domestik yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka.

Kekerasan secara umum didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang. Dalam hal ini segala bentuk ancaman, cemooh penghinaan, mengucapkan kata-kata kasar yang terus menerus juga diartikan sebagai bentuk tindakan kekerasan. Dengan demikian kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai manusia atau untuk merusak barang, serta pula mencakup ancaman pemaksaan terhadap kebebasan individu (Purnianti, 1996: 2).

Pengertian secara umum Kekerasan dalam rumah tangga adalah Kekerasan yang dilakukan Suami terhadap istri, hal ini dijelaskan dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 pasal 1 ayat (1)

*“kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.*



Dari beberapa pengertian di atas maka yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain sehingga menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik maupun nonfisik.

## **2. Definisi Rumah Tangga**

Pengertian rumah tangga atau keluarga dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa yang menjadi objek pembicaraan tentang kekerasan terhadap perempuan. Dalam buku Munandar Soelaeman (2006:115) keluarga diartikan sebagai suatu satuan sosial terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial, yang ditandai adanya kerja sama ekonomi. Fungsi keluarga yaitu berkembang biak, mensosialisasi atau mendidik anak, menolong, melindungi atau merawat orang tua (jompo). Deferensi peranan ialah fungsi solidaritas, alokasi ekonomi, alokasi kekuasaan, alokasi integrasi (sosialisasi), dan ekspresi atau menyatakan diri. Kesemuanya atas pertimbangan umur, perbedaan seks, generasi, perbedaan posisi ekonomi, dan pembagian kekuasaan. Bentuk keluarga terdiri dari seorang suami, seorang istri, dan anak-anak yang biasanya tinggal dalam satu rumah yang sama (disebut keluarga inti). Ragam bentuk rumah tangga mempunyai banyak pengertian bagi interaksi keluarga. Ia membantu mempengaruhi, misalnya kesempatan berkurang atau bertambah eratnya hubungan sosial antara anggota-anggota kelompok, sanak saudara. Tambahan pula pola struktur mempertegas proses tekanan dan penyesuaian diri diantara sanak. Berbagai macam hubungan peran harus diuraikan secara terperinci, jika rumah tangga itu mencakup sanak tertentu. Seumpama jika rumah tangga itu mencakup

seorang lelaki dan ibu mertuanya, mungkin ada peraturan-peraturan yang menuntut banyak pegekangan atau meniadakan hubungan antara keduanya. Pola pemasyarakatan dipengaruhi oleh siapa yang termasuk dalam rumah tangga. Seorang ibu mertua dapat terus mengawasi proses sosialisasi menantu perempuannya yang masih muda, atau seorang anak laki-laki dapat pindah ke rumah saudara laki-laki ibunya untuk 30 dibesarkan di situ. Keluarga inti terdiri dari suami, istri, dan anak-anak mereka. Rumah tangga itu dapat diperbesar oleh populasi per generasi maupun secara menyisi (*laterally*) dengan menambahkan keluargakeluarga inti lainnya. Sebutan keluarga yang diperluas (*extended family*) secara lepas dipergunakan bagi sistem di mana masyarakatnya menginginkan bahwa beberapa generasi itu hidup di bawah satu atap. Keluarga besar yang diperluas tumbuh dan merosot selama bertahun-tahun karena dipengaruhi kesuburan, perkawinan dan perceraian, kematian, peraturan tempat tinggal, dan alternatif kesempatan yang terbuka bagi anggota-anggotanya. Keluarga yang diperluas lebih banyak ditemukan di daerah pedusunan dan bukan daerah industri, karena bentuk macam itu dapat memberikan layanan sosial yang biasanya tidak terdapat pada masyarakat yang tidak mempunyai banyak badan dan organisasi khusus. Dengan kata lain orang-orang yang hidup dalam unit seperti itu dapat meminta bantuan pada banyak orang lain. Rumah tangga yang diperluas, sekalipun dengan pengantiannya, lebih dapat bertahan dari pada rumah tangga yang hanya terdiri dari suami istri.

Rumah tangga menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 1 (1990) adalah tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal manusia. Rumah tangga memiliki pengertian tempat tinggal beserta penghuninya dan segala yang ada

di dalamnya. Rumah tangga adalah unit perumahan dasar dimana produksi ekonomi, konsumsi, warisan, membesarkan anak, dan tempat tinggal yang terorganisasi dan dilaksanakan. Anggota rumah tangga adalah semua orang yang bertempat tinggal disuatu rumah, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada. Anggota rumah tangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah dan tamu yang tinggal di rumah tangga kurang dari 6 bulan tetapi akan bertempat tinggal 6 bulan dianggap sebagai anggota rumah tangga (Mantra, 2003:16 - 17) .

Adapun yang termasuk cakupan rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

- a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan di atas karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT.

### **3. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan yang menimpa perempuan hadir dalam seluruh jenis hubungan sosial yang dijalaninya, termasuk dalam hubungan keluarga, perkawanan dekat, dalam hubungan kerjanya, maupun hubungan sosial

kemasyarakatannya. Kekerasan itu pun dapat menimpa perempuan dimana saja, baik itu berada di ruang publik ataupun ruang rumah tangga. Adapun jenis - jenis kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam bentuk (Harnoko, 2010:184-185) :

#### **1). Kekerasan Fisik**

Yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lain. Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan, antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, menginjak, penendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti : pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat. Secara umum dari berbagai kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam bentuk-bentuk fisik yakni : pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan. Bentuk-bentuk tindakan tersebut dapat terjadi pada, suami terhadap istri atau sebaliknya, ayah terhadap anaknya atau sebaliknya, ibu terhadap anaknya, kakak terhadap adik anggota keluarga terhadap pembantu rumah tangga (Soeroso, 2010:80-81).

#### **2). Kekerasan Psikologis/Nonfisik**

Yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, ancaman) yang menekan emosi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat

pada seseorang. Dalam Soeroso (2010 : 81), bentuk nonfisik dari tindakan kekerasan yaitu, penghinaan, komntar-komentar yang dimaksudkan merendahkan dan melukai harga diri dari pihak istri, melarang istri bergaul, ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua, akan menceraikan dan memisahkan istri dari anak-anaknya.

### **3). Kekerasan Seksual**

Yaitu kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut sebagai perkosaan. Tindakan kekerasan ini bisa diklasifikasikan dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikologis. Tindak kekerasan seksual meliputi perkosaan, pelecehan seksual. Kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu, tertera dalam pasal 8 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Soeroso, 2010:83-84). Kekerasan seksual meliputi pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya, pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri, pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi, memaksa istri menjadi pelacur atau sebagainya.

#### 4). **Penelantaran Rumah Tangga**

Yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut. Dalam UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (pasal 9) tindakan kekerasan ekonomi ini yakni penelantaran rumah tangga yang juga dimasukan dalam pengertian kekerasan. Karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut (Soeroso, 2010 : 84).

Bentuk dari kekerasan ekonomi ini dapat berupa tidak memberi nafkah pada istri, memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri, membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami. Terkecuali istri yang bekerja karena kemauan sendiri dan merasa tidak di eksploitasi oleh suami dan tidak ada pemaksaan. Biasanya dari berbagai tindak kekerasan diatas kekerasan psikis merupakan awal dari terjadinya kekerasan fisik. Karena pada kenyataannya dapat terjadi kekerasan fisik dan psikis secara bersamaan. Menurut Pasal 2 Deklarasi PBB (Susiana, 2012 : 10) tersebut, kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada: Pertama, tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga

dan masyarakat, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (marital rape), perusakan alat kelamin perempuan, dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan; kedua, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa; ketiga kekerasan yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, di manapun terjadinya.

Berdasarkan Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pada pasal 5 - 9, UU tersebut menyebutkan ada 4 kategori kekerasan. Pertama ialah kekerasan fisik, jenis kekerasan ini merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka berat. Sedangkan kedua, Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Ketiga, Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Dan keempat, Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, tanpa memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Soeroso, 2010:180-181).

Dalam hal ini peran Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai pendamping hadir untuk melakukan perannya dalam pendampingan terhadap bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Ada Undang undang yang secara

khusus mengatur upaya-upaya memberikan perlindungan kepada perempuan yang mengalami kekerasan. UU itu adalah UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Dalam UU PKDRT pasal 4 ditegaskan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan : (a) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, (b) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, (c) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, (d) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Korban kekerasan menurut UU PKDRT berhak mendapatkan:

- (1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- (2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- (3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- (4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Peran LSM sebagai pendamping memiliki peran yang cukup besar dalam upaya perlindungan bentuk kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk meringankan beban derita para korban dan keluarganya, diantaranya berkat keberanian dari para pendamping yang dengan gagah berani rela mencurahkan waktu, tenaga, dana, bahkan jiwa bekerja untuk kepentingan para korban berhadapan dengan aparatus negara yang sangat represif pada waktu itu. Relawan pendamping harus mengetahui hak-hak korban kekerasan sebagaimana tertuang dalam pasal 10 UU PKDRT agar ia dapat



melaksanakan tugasnya dengan baik. Demikian pula, tata cara atau proses pengaduan atau laporan terjadinya kekerasan harus juga diketahui oleh para relawan. Para relawan pendamping pun juga sebaiknya dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan tugasnya, misalnya berkomunikasi dengan pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, tenaga kesehatan, pembimbing rohani maupun dengan pekerja sosial. Dalam memberikan pelayanan kepada korban, relawan pendamping dapat melakukan hal-hal berikut :

- 1) menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping
- 2) mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya
- 3) mendengarkan secara empati segala penuturan korban, sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping
- 4) memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban (pasal 23 UU PKDRT).

Korban kekerasan atau orang lain dapat melaporkan kekerasan kepada kepolisian. Sesuai ketentuan UU PKDRT, dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan, kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara kepada korban. Perlindungan sementara ini dapat diberikan paling lama 7 hari sejak korban ditangani. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari

pengadilan. Selain kepolisian, permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, relawan pendamping atau pembimbing rohani. Ketua Pengadilan dalam tenggang waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan, wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain. Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan. Permohonan perpanjangan tersebut diajukan 7 hari sebelum berakhir masa berlakunya. Selain memperoleh perlindungan, korban kekerasan juga mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani guna pemulihan fisik maupun mental-rohaniyah. Dalam hal kesehatan, korban memperoleh pemeriksaan dan perawatan dari tenaga kesehatan. Untuk menguatkan atau memberikan rasa aman kepada korban, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/ atau pembimbing rohani wajib memberikan layanan kepada korban berupa pemberian konseling. Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerjasama . Penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerjasama diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006. Menurut PP Nomor 4 Tahun 2006 pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya baik secara fisik maupun psikis. Penyelenggaraan pemulihan merupakan segala tindakan, meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban terhadap bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Secara rinci, pasal 4 PP

tersebut mengatur kegiatan pemulihan korban, yaitu: pelayanan kesehatan, pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani dan resosialisasi. Pendampingan korban dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling, terapi, bimbingan rohani dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban.

Lembaga sebagai pendamping korban kekerasan dalam rumah tangga bersama tenaga lainnya memiliki peran penting terutama dalam memberikan konseling dengan mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan guna menguatkan dan memulihkan diri si korban. Sesuai dengan ketentuan PP No. 4 Tahun 2006, dalam memberikan layanan pemulihan kepada korban kekerasan, relawan pendamping memiliki tugas : (1) membangun hubungan yang setara dengan korban agar bersedia membuka diri dalam mengemukakan persoalannya, (2) berempati dan tidak menyalahkan korban mengenai atau yang terkait dengan permasalahannya, (3) meyakinkan korban bahwa tidak seorangpun boleh melakukan tindakan kekerasan, (4) menanyakan apa yang ingin dilakukan dan bantuan apa yang diperlukan, (5) memberikan informasi dan menghubungkan dengan lembaga atau perorangan yang dapat membantu mengatasi persoalannya dan/atau membantu memberikan informasi tentang layanan konsultasi hukum. Apabila diperlukan, dalam melakukan tugasnya, pendamping dapat bekerjasama dengan : (1) kepolisian, untuk melaporkan dan memproses pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, (2) advokat, untuk membantu korban dalam proses peradilan, (3) penegak hukum lainnya, untuk korban dalam proses di sidang pengadilan,

(4) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, (5) Pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selama ini terjadi relatif berbeda antara korban yang satu dengan korban yang lain. Menurut Ciciek (2005: 33-34), mengemukakan bahwa faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

- 1) Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan mendidiknya agar mempunyai keyakinan bahwa lelaki harus kuat dan damai. Lelaki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang sekelilingnya ketika memasuki rumah tangga. Suami seolah-olah mempunyai hak atas istrinya sehingga dengan cara apapun suami dapat bertindak terhadap istrinya tersebut termasuk dalam bentuk kekerasan. Hal ini yang melanggengkan budaya kekerasan.
- 2) Adanya kebiasaan yang mendorong perempuan atau istri agar supaya bergantung pada suami khususnya secara ekonomi. Hal ini membuat perempuan sepenuhnya berada di bawah kuasa suami. Akibatnya istri sering diperlakukan semena-mena sesuai kehendak suami.
- 3) Fakta menunjukkan bahwa lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Anggapan suami atau laki-laki mempunyai kekuasaan terhadap istri ini dapat berada di bawah kendali suami. Jika istri melakukan kekeliruan, maka suami dapat berbuat apa saja terhadap istrinya termasuk dengan kekerasan.
- 4) Masyarakat tidak menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan sosial tetapi persoalan pribadi antara suami istri. Adanya anggapan masyarakat bahwa masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah urusan

pribadi atau masalah rumah tangga yang orang lain tidak layak mencampurinya.

5) Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Penafsiran ini mengakibatkan pemahaman bahwa agama juga membenarkan suami untuk melakukan pemukulan terhadap istri dalam rangka mendidik. Suami adalah penguasa yang mempunyai kelebihan-kelebihan kodrat yang merupakan anugerah Tuhan. Pemahaman ini akan melestarikan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Adapun pendapat lain mengenai faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga yakni menurut LKBHUWK, sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi (Soeroso, 2010: 76).

Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya.

Menurut Soeroso (2010: 77-80) berikut beberapa faktor pemicu/pendorong kekerasan dalam rumah tangga yang diperoleh dari penelitian penulis lakukan pada tahun 1999:

a. Masalah keuangan

Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan di antara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah suami.

b. Cemburu

Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan.

c. Masalah Anak

Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri.

d. Masalah Orang Tua

Dalam penelitian diperoleh gambaran bahwa bagi orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya seringkali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan.

e. Masalah Saudara

Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara suami dengan saudara istri, menyebabkan terjadinya jurang pemisah dan menimbulkan semacam jarak antara suami dan istri.

f. Masalah Sopan Santun

Suami dan istri berasal dari keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Untuk itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama

dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing, kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenan di hati masing-masing pasangan, harus dihilangkan. Antara suami dan istri harus saling menghormati dan saling penuh pengertian.

g. Masalah Masa Lalu

Pertengkaran yang dipicu karena adanya cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan.

h. Masalah Salah Paham

Kesalahpahaman yang tidak segera dicarikan jalan keluar atau segera diselesaikan akan menimbulkan pertengkaran dan dapat pula memicu kekerasan.

i. Masalah Tidak Memasak

Memang ada suami yang mengatakan hanya mau makan masakan istrinya sendiri, sehingga kalau istri tidak bisa masak akan ribut. Sikap suami seperti ini menunjukkan sikap dominan. Oleh karena saat ini istri tidak hanya dituntut di ranah domestik saja tetapi juga sudah memasuki ranah publik. Perbuatan suami tersebut menunjukkan sikap masih mengharap istri berada di ranah domestik atau dalam rumah tangga saja. Istri yang merasa tertekan dengan sikap ini akan melawan, akibatnya timbul pertengkaran mulut yang berakhir dengan kekerasan.

j. Suami Mau Menang Sendiri

Dalam penelitian Moerti Hadiati dan Tri Susilaningsih (1999) diperoleh gambaran bahwa masih terdapat suami yang merasa “lebih” dalam segala hal dibandingkan dengan istri. Oleh karena itu, suami

menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam “undang-undang”, dimana semua orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya. Dengan demikian kalau ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah yang lain, maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan (Moerti Hadiati, 2010: 80).

#### **4. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Berdasarkan data yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia, istri merupakan korban utama dalam kekerasan rumah tangga. Istri sebagai korban kekerasan berasal dari semua golongan masyarakat yang tidak memandang dari segi lapisan sosial, golongan pekerjaan, suku, bangsa, budaya, agama maupun rentang usia tertimpa musibah kekerasan. Kekerasan yang dialami korban mengakibatkan timbulnya berbagai macam penderitaan. Penderitaan tersebut berupa fisik yaitu perbuatan yang bisa mengakibatkan rasa sakit, secara ekonomi karena tidak diberi nafkah, penderitaan psikologis yang bisa mengakibatkan rasa takut, tidak percaya diri dan sebagainya, sedangkan penderitaan secara seksual seperti pemaksaan hubungan seksual.

Korban kekerasan bisa mengenali fakta kekerasan psikis sementara waktu, untuk pengenalan awal menyadari seseorang diketahui menjadi korban atau sedang menderita gangguan psikologis sebagai variasi dan tanda-tanda terganggunya kondisi psikologis sebagai berikut:

##### **a. Ketakutan (fear)**

Diantara gejala yang muncul seperti jika seseorang berada dalam keadaan kecemasan berkelanjutan karena relasi dirasa tidak berimbang. Seseorang merasa sama sekali tidak bisa mengambil keputusan terutama



dalam situasi mendesak. Selalu khawatir bersikap karena ketergantungan permanen.

**b. Rasa tidak percaya diri (PD)**

Rasa tidak PD dapat berarti orang tidak bisa membuat konsep diri positif orang kemudian terjangkiti dan didominasi oleh konsep diri negatif hingga tidak menemukan cara menghargai dirinya. Gejala ini ditandai dengan oleh sikap merendah terus menerus atau minder (inferior), selalu menyerahkan urusan kepada orang lain, dan merosotnya eksistensi diri hingga tidak lagi memiliki harapan untuk membuat nilai positif dalam hidupnya.

**c. Hilangnya kemampuan untuk bertindak**

Orang dengan situasi trauma atau mengalami kejenuhan permanen akibat harga dirinya lemah akan jatuh pada situasi pesimis dalam memandang hidup dan hingga enggan melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Efek kekerasan psikis menimbulkan trauma degenetatif (mematahkan semangat berkembang generasi).

**d. Adanya situasi tidak berdaya (helplessness)**

Situasi ini juga merupakan gangguan pribadi dan dikatakan orang sakit secara psikologis. Ciri-ciri helplessness antara lain putus asa, menyerah sebelum berbuat, fatalistic, dan selalu menggantung diri, pada otoritas. Orang yang tidak berdaya akan sulit melakukan komunikasi.

**5. Peran Pendampingan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Berikut peranan pendampingan menurut Direktorat Bantuan dan Jaminan Sosial (2007: 8):

1) **Fasilitator**, yaitu peranan untuk membantu korban tindak kekerasan sehingga korban dapat berkembang dan memperoleh akses terhadap berbagai sumber yang dapat mempercepat keberhasilan usahanya.

2) **Penghubung**, yaitu peranan sebagai media yang dapat menghubungkan antara korban dengan sistem sumber sehingga korban memperoleh akses yang baik akses terhadap sumber-sumber tersebut yang dapat dimanfaatkan oleh korban dalam rangka menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi.

3) **Pendidik**, yaitu peranan sebagai pembimbing yang peningkatan kemampuan dan keterampilan korban dalam rangka pengembangan usaha yang dilakukan dan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya.

4) **Penolong**, yaitu peranan sebagai orang yang memberikan bantuan pertolongan kepada korban dalam rangka menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi.

**Tugas dan Tanggung Jawab Pendamping adalah :**

- 1) Memberikan pelayanan pendampingan kepada korban tindak kekerasan.
- 2) Memfasilitasi pelayanan yang ditujukan bagi korban tindak kekerasan.
- 3) Menghubungkan korban tindak kekerasan dengan sistem sumber yang ada dalam masyarakat.
- 4) Mendidik dan melatih para korban tindak kekerasan.
- 5) Membantu korban tindak kekerasan
- 6) Menjalankan tugas sesuai dengan perananan.

Prinsip-Prinsip Dasar Pendamping Dalam melaksanakan tugasnya, pendamping harus berpatokan pada prinsip-prinsip pekerjaan sosial sebagai berikut :

- 1) **Penerimaan**, yaitu sebagai pendamping harus bisa menerima korban apa adanya tanpa memandang latar belakangnya.
- 2) **Individualisasi**, yaitu harus memahami bahwa korban merupakan pribadi yang tidak sama dengan korban lainnya.
- 3) **Bersikap tidak menghakimi**, pendamping harus memahami perilaku perilaku korban tanpa menghakimi atau melakukan penilaian secara sepihak.
- 4) **Kerahasiaan**, pendamping harus bisa menjaga kerahasiaan korban yang bersifat pribadi kepada orang lain.
- 5) **Rasional**, pendamping harus memberikan pertimbangan yang bersifat obyektif dan masuk akal dalam setiap tindakan penanganan masalah yang diambil.
- 6) **Empati**, pendamping harus mampu menunjukkan sikap memahami perasaan korban.
- 7) **Kesungguhan dan ketulusan**, dalam memberikan pelayanan harus dilandasi sikap yang tulus.
- 8) **Mawas diri**, pendamping harus menyadari akan potensi dan keterbatasan dirinya.
- 9) **Partisipatif**, pendamping melibatkan korban untuk proaktif menentukan pilihan-pilihan yang terbaik bagi dirinya